

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Negara menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian, Pemerintah menyadari bahwa Sistem Informasi memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang telah diterapkan di berbagai sektor Pemerintah. Pemerintah berusaha untuk menyelaraskan layanan publik dengan kemajuan teknologi dalam bentuk penerapan layanan elektronik atau *e-government*. Dalam bidang keuangan Negara, *e-government* diwujudkan dalam bentuk *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) adalah sarana untuk mewujudkan *e-government* di sektor keuangan negara. Tujuan Implementasi IFMIS adalah untuk mengatasi masalah yang timbul dari penggunaan sistem manual atau sistem terpisah-pisah dalam proses pengelolaan anggaran dan akuntansi.

Reformasi pelaporan keuangan dimulai pada tahun 2003 dengan terbitnya 3 (tiga) paket hukum di bidang keuangan Negara yaitu UU bidang Keuangan Negara yaitu UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut mereformasi pengelolaan keuangan negara, salah satunya terkait pertanggungjawaban APBN/APBD. Peraturan ini mensyaratkan hal-hal berikut: Presiden Republik Indonesia dan pimpinan daerah menyampaikan laporan

keuangan kepada DPR RI/DPRD paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran setelah dilakukannya pemeriksaan oleh BPK R.I. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Nasional (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Nasional (KSAP).

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pelaporan pertanggungjawaban APBN pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk pertama kalinya BPK RI memantau LKPP dan memberikan pendapat terhadapnya. Pada Tahun Anggaran 2005 juga KSAP menerbitkan SAP yang berbasis Kas menuju Akrual.

Salah satu wujud nyata penerapan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui penyusunan laporan Keuangan Negara yang relevan dan andal, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sistem akuntansi yang menyediakan prosedur transaksi sampai menjadi laporan keuangan.

Dalam proses pelaporan keuangan, Kementerian/Lembaga menggunakan alat bantu berupa aplikasi yang mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam periode pelaporan sebelum tahun 2015, Kementerian/Lembaga menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menggunakan akuntansi akrual dan kas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pemerintah harus mulai menerapkan standar akuntansi berbasis akrual pada Tahun Anggaran 2015, yang merupakan

tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai implementasi pelaksanaan basis akrual, pemerintah melalui peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pemerintah menerapkan dan menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Untuk memperhitungkan perlakuan akuntansi yang tepat dalam pelaporan keuangan pemerintah. Hingga Tahun Anggaran 2019, Kementerian/Lembaga masih menggunakan aplikasi SAIBA dalam proses pelaporan keuangan.

Pemerintah bertanggungjawab memberikan informasi informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan sistem informasi yang andal. Aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara digunakan oleh Satker dalam pengelolaan keuangan negara. Digunakan setidaknya sembilan aplikasi: SAS, SIMAK-BMN, Inventory, RKA K/LDIPA, SiLabi, SAIBA, e-Rekon, Pin PPSPM, dan Renkas. Karena tidak semua Satker memiliki sumber daya yang memadai, banyaknya aplikasi membuat Satker merasa terbebani karena harus menguasai semua aplikasi tersebut. Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara konsisten mengembangkan teknologi informasi yang disediakan untuk meningkatkan dan mempercepat pengelolaan keuangan negara, untuk memenuhi tuntutan tersebut, melalui Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) telah mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem ini diterapkan di seluruh Satuan Kerja

instansi pemerintah pusat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di seluruh Indonesia.

Pengelolaan keuangan negara diharapkan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan sebuah Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. SAKTI terdiri dari seluruh proses pengelolaan keuangan negara oleh Satuan Kerja (Satker) yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan SAKTI merupakan gabungan dari beberapa kewenangan seperti Bendahara, Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSM). Dengan adanya aplikasi SAKTI, maka satuan kerja diharapkan mampu menyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja.

Berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 SAKTI memiliki beberapa Modul diantaranya: Modul Sinkronisasi Rencana Kerja – Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (Renja – RKA) Modul Administrasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aktiva Tetap, Modul Piutang, Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Selama dua tahun pelaksanaan *piloting* aplikasi SAKTI (2021-2022), terdapat kendala dalam penerapan aplikasi SAKTI pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera II Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan diantaranya masih terjadinya hambatan dalam melakukan *print out* laporan keuangan

dikarenakan laporan keuangan hanya dapat dicetak pada aplikasi selain aplikasi SAKTI dan tidak terjadinya interkoneksi saat melakukan penginputan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran terkait saldo kas tunai pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sehingga memerlukan pencatatan manual kembali. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Nugroho & Lestyowati, 2020) menyatakan bahwa dalam implementasi Aplikasi SAKTI perlunya evaluasi dan pengembangan aplikasi SAKTI dan penelitian oleh (At-tamimi & Siregar, 2021) menyatakan bahwa Pengukuran Keberhasilan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kementerian Sekretariat Negara belum sukses berdasarkan dengan Pendekatan Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang ditimbulkan dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) diantaranya masih terjadinya hambatan dalam penerapan aplikasi tersebut antara lain:

1. Masih terjadinya hambatan dalam melakukan *print out* laporan keuangan dikarenakan hasil laporan keuangan hanya dapat dicetak pada aplikasi lain selain Aplikasi SAKTI.

2. Tidak terjadinya interkoneksi pada saat melakukan penginputan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran terkait saldo kas tunai pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sehingga memerlukan pencatatan manual kembali.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Berdasarkan pengidentifikasian permasalahan, penulis menyusun batasan permasalahan agar penelitian ini lebih difokuskan dengan pengaruh penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap pengelolaan laporan keuangan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.

1.3.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pengaruh penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap pengelolaan laporan keuangan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah permasalahan diuraikan, tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap pengelolaan laporan keuangan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pengembangan Bidang Ilmu Sistem Informasi Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor yang memengaruhi keandalan pengelolaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

b. Bagi pengembangan bidang ilmu pengelolaan keuangan negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor yang memengaruhi keandalan pengelolaan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi pengguna Aplikasi

Sebagai masukan untuk mengetahui penerapan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dalam pengelolaan laporan keuangan Satuan Kerja.

b. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan dan wawasan terutama yang terkait dalam masalah ini serta sebagai wadah dalam menerapkan teori yang dipelajari.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi dan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penerapan aplikasi SAKTI dan menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan penerapan aplikasi SAKTI.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Menurut (Sutabri, 2012) sistem informasi adalah sistem dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Menurut (Heriyanto Yunahar, 2018) sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dalam menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut (Hutahaean, 2015) informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

Menurut (Edhy, 2003) sistem informasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berintegrasi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun disaat mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan.

Menurut Alter (1992) Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Gelinas (1990) Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri dari sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Menurut Wilkinson (1992) Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran – sasaran Perusahaan.

Dari uraian beberapa para ahli informasi dapat disimpulkan sistem informasi adalah berupa proses pengolahan data yang menghasilkan berupa informasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan.

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi

Menurut (James Hall, 2012) tujuan disusunnya sistem informasi antara lain:

1. Untuk mendukung fungsi pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepengurusan (manajemen) suatu organisasi/perusahaan, karena manajemen bertanggungjawab untuk menginformasikan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen

untuk melakukan pertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan.

3. Untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan. Sistem informasi membantu personil operasional untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

2.1.3 Kualitas Sistem Informasi

Kebutuhan informasi di dalam organisasi sangat bervariasi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh setiap pengguna. Menurut Koivumaki, Ristola, dan Kesti (2008) pemenuhan kebutuhan tugas atau pekerjaan yang dihadapi kualitas informasi juga menjadi persyaratan yang harus dipertimbangkan. Dimana mereka juga menambahkan bahwa informasi dikatakan berkualitas jika informasi tersebut relevan dengan pengguna dan juga harus disiapkan dalam waktu dan jumlah yang sesuai.

Jang, Kim, dan Hwang (2006) berpendapat bahwa kualitas informasi itu menggambarkan atau merepresentasikan nilai dari informasi itu sendiri, yang mana jika informasi bernilai tinggi maka kualitas akan informasi tersebut juga tinggi, dan sebaliknya apabila nilai informasi itu rendah maka kualitas informasi tersebut juga rendah. Hal ini juga didukung oleh Laumer, Maier, dan Weitzel (2017) yang menyatakan bahwa kualitas informasi itu merepresentasikan karakteristik nilai dari informasi itu sendiri sedangkan Jang, Kim, dan Hwang (2006) menambahkan pendapat bahwa nilai dari informasi itu juga akan berubah tergantung pada situasi atau kondisi dimana informasi itu dibutuhkan. Nilai informasi dapat dinilai secara berbeda-beda tergantung pada pengguna, objek penggunaan, dan situasi dimana sistem digunakan.

DeLone dan McLean (1992) memasukkan kategori kualitas informasi dalam model kesuksesan sistem informasi, dimana pengukuran kualitas output atau informasi dapat ditinjau dari beberapa pengukuran seperti akurasi informasi, ketepatan waktu keluaran, keandalan, kelengkapan, relevansi, presisi, pemformatan, kegunaan, kecukupan informasi, dapat dimengerti, bebas dari bias, komparabilitas, kenyamanan, dapat diinterpretasikan dan kemampuan adaptasi. Kualitas informasi memiliki pengaruh yang positif pada penggunaan sistem dan memberikan kepuasan bagi pengguna.

Menurut (Jogiyanto, 1990) kualitas informasi terdiri dari 3 hal antara lain:

1. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Informasi harus memiliki keakuratan tertentu agar tidak diragukan kebenarannya.
2. Tepat pada waktunya, informasi yang datang pada penerima tidak boleh datang terlambat, karena informasi yang datang tidak tepat waktu, tidak bernilai lagi, sebab informasi digunakan dalam proses pembuatan keputusan.
3. Relevan, informasi yang ada memiliki nilai kemanfaatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemakainya. Informasi memiliki tingkat relativitas yang berbeda, tergantung pada tingkat pemakai.

2.2 SAKTI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 171/PMK.05/2021 Tanggal 29 November 2021 Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Aplikasi SAKTI memiliki beberapa modul sebagai berikut:

1. **Modul Sinkronisasi Rencana Kerja – Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Renja – RKA K/L)**

Modul Renja – RKA K/L memuat informasi tentang program, tujuan program, indikator kinerja program, kegiatan, sasaran kinerja dan indikator kinerja kinerja, serta nama unit organisasi, nama unit kerja, lokasi, klasifikasi data keluaran, informasi produk, komponen, sub komponen, akun, informasi kinerja, anggaran dan sumber pendanaan. RKA K/L disusun setelah Kementerian Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan memutuskan pagu anggaran dan mengacu pada Renja K/L yang telah ditetapkan.

2. **Modul Administrasi**

Modul Administrasi merupakan suatu modul yang diperuntukkan bagi seorang administrator dalam mengelola konfigurasi sistem, akun pengguna hak akses dan update referensi.

3. Modul Penganggaran

Modul Penganggaran merupakan modul yang melakukan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu Tahun Anggaran.

Fitur yang dimiliki oleh Modul Penganggaran antara lain:

Penyusunan Anggaran (*Budget Preparation*) terdiri dari SBK, RKAKL dan KPJM

- a. Pelaksanaan Anggaran (*Management of Spending Authority*) terdiri dari DIPA, POK, Perencanaan Kas
- b. Locking pagu pada proses revisi anggaran
- c. Perhitungan pergerakan AFP

Output modul penganggaran antara lain:

- a. ADK RKAK/L
- b. ADK DIPA

4. Modul Komitmen

Modul Komitemen merupakan modul yang melakukan aktifitas terkait Pencatatan Supplier, data Perikatan/Kontrak, Pencatatan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dan konfirmasi Capaian Output.

Ruang Lingkup modul komitmen diantaranya:

- a. Manajemen Supplier merupakan kegiatan mengelola data pembayaran, untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- b. Manajemen Kontrak merupakan kegiatan mengelola data kontrak (perikatan dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN
- c. Pencatatan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu mencatat BAST untuk mengakui aset utang pada saat serah terima. Terdiri dari BAST Kontraktual ataupun Non Kontraktual
- d. Konfirmasi Capaian Output melakukan pencatatan rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satuan Kerja (Satker).

Output Modul Komitmen diantaranya:

- a. ADK Suplier
- b. ADK Kontrak
- c. DATA BAST
- d. Data Capaian Output

5. Modul Bendahara

Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara yang meliputi: Bendahara Pengeluaran&Bendahara Penerimaan

Ruang Lingkup modul bendahara

- a. Penatausahaan LS Bendahara
- b. Penatausahaan UP/TUP
- c. Penatausahaan potongan/pungutan pajak
- d. Penatausahaan Surat Bukti setoran pendapatan, pengembalian belanja
- e. Transaksi lain yang dikelola oleh Bendahara

Output Modul Bendahara diantaranya:

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

6. Modul Pembayaran

Modul Pembayaran: modul yang memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dan APBN.

Output Modul Pembayaran diantaranya:

- a. Dokumen
 - 1) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 2) Surat Perintah Bayar (SPBy)
 - 3) Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH)
 - 4) Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) atau yang dipersamakan
 - 6) Arsip Data Komputer (ADK)
 - 7) ADK RT
 - 8) ADK SPM atau yang dipersamakan

7. Modul Persediaan

Modul Persediaan merupakan modul SAKTI yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB).

Metode pencatatan yang digunakan adalah Metode Perpetual

Metode Penilaian diantaranya:

- a. Metode Harga Beli Terakhir
- b. Metode Haraga Rata-rata (*Average*)
- c. Metode FIFO (*First In First Out*) metode yang dipergunakan di dalam SAKTI pada saat ini.

Output Modul Persediaan terdiri dari Laporan Persediaan

8. Modul Piutang

Modul Piutang merupakan bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker penggunaan SAKTI.

Ruang lingkup modul piutang diantaranya:

Modul Piutang menatausahakan Jenis transaksi piutang antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi Piutang PNB
2. Transaksi Piutang Usaha Tagihan Penjualan Angsuran
3. Transaksi Piutang Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

9. Modul Aset Tetap

Modul Aset tetap merupakan modul dalam SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntasian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan Konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya.

Fitur modul Aset Tetap diantaranya:

- a. Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk didalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bersejarah, Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi Pemerintah.
- b. Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan, dan penghapusan.
- c. Pengakuntasian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual
- d. Perhitungan dan pengakuntasian penyusutan Aset Tetap

Metode Penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus

Output Modul Aset Tetap diantaranya:

- a. Laporan Barang Milik Negara (BMN)
- b. Laporan Kondisi Barang
- c. Laporan Penyusutan

10. Modul Pelaporan

Modul Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan.

Ruang Lingkup modul pelaporan diantaranya:

- a. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul-modul lain terkait
- b. Sistem pelaporan manajerial (statistik)
- c. Sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan

Output modul pelaporan diantaranya:

- a. Lap Operasional
- b. Laporan Perubahan Ekuitas
- c. Neraca
- d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2.3 Pengelolaan Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pada dasarnya pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan terdiri dari dua bagian kata: manajemen dan keuangan. Kata manajemen memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya.

Menurut (Arianti, 2003) dalam (Iskandar, 2019) manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, kepemimpinan dan merupakan suatu proses pengendalian.

Menurut Maysarah (2019) pengelolaan keuangan adalah proses penerahan tenaga orang lain untuk melakukan kegiatan pengelolaan keuangan. kegiatan tersebut berkisar dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Pengelolaan keuangan sekolah dimulai dari perencanaan anggaran hingga pemantauan dan pertanggungjawaban respon keuangan.

Menurut Husnan Suad (2019) pengelolaan keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan. Fungsi keuangan kini menjadi kegiatan terpenting yang perlu dilakukan oleh kepala daerah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah proses pengkoordinasian fungsi-fungsi keuangan oleh para pengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.3.2 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Munawir (2007) adalah “laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.

Menurut IAI (2009:27) “laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara

seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan berbagai integral dari laporan keuangan”.

Menurut Kasmir (2012) mengemukakan bahwa dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti”.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.

Komponen-komponen yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah dalam antara lain:

1. Laporan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan.

2. Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang Menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas.

3. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk satu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik

dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen dan distribusi lain kepemilikan termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen dan distribusi lain kepemilikan ekuitas selama satu periode.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah. Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Untuk tujuan umum, setiap arus kas harus mempunyai referensi silang dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus di buat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
1.	(Nasution & Nasution, 2022)	Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship	Penerapan Aplikasi Sakti Dalam Pengelolaan Keuangan DiBadan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera	X1: Aplikasi sakti X2: Pengelolaan keuangan	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Reduksi Data, Hal ini dilakukan dengan meringkas dan mengklasifikasikan masalah yang diteliti untuk memfokuskan hasil temuan pada apa yang peneliti anggap penting dan untuk memudahkan pemahaman data yang dikumpulkan di lapangan; Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Observasi, Metode ini digunakan dengan cara melihat langsung	Penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Tingkat Keuangan Instansi) tertuang dalam PMK nomor 171/PMK.05/2021 dan mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai di BNNP Sumut yang menjabat sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir. Di BNN sudah menerapkan aplikasi SAKTI sejak awal tahun 2022 dalam melakukan pengelolaan keuangan di BNN Provinsi Sumut dan untuk penerapannya BNN Provinsi Sumut cukup maksimal namun tetap harus ada pelatihan bagi pegawai

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
					kelapangan untuk mengetahui secara langsung mengenai penerapan aplikasi SAKTI di BNNP Sumut; 2. Wawancara	
2.	(Supristiowa di & Sucahyo, 2018)	Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik	Manajemen Risiko Keamanan Informasi Pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Kementerian Keuangan	X1 : keamanan informasi X2: sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI)	Kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Ditjen Perbendaharaan Langkah berikutnya dalam penyusunan manajemen risiko keamanan informasi SAKTI adalah pengumpulan data. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara, dan studi dokumentasi	Penetapan konteks adalah proses awal yang dilakukan untuk menentukan baseline atau dasar dari seluruh proses penyusunan manajemen risiko keamanan informasi SAKTI.
3.	(Nugroho & Lestyowati, 2020)	Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan	Analisis Tingkat Kepuasan Dan Kepentingan Pengguna Aplikasi Sakti	X1: tingkat kepuasan X2: pengguna aplikasi sakti	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif	Pengujian validitas alat ukur dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung nilai korelasi dengan rumus Product

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
		Kebijakan Publik	Dengan Pieces Framework			Moment. Setelah dilakukan uji korelasi dengan menggunakan SPSS 25, didapatkan hasil nilai Pearson Correlation dari setiap variabel PIECES (6 variabel) untuk harapan/kepentingan dan Semua butir pertanyaan tingkat kepentingan dan kepuasan untuk 6 variabel PIECES memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga valid (ditandai dengan adanya tanda bintang dan signifikan pada taraf 0,05).
4.	(Wibowo, 2019)	Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik	Proses difusi inovasi program sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI): studi kasus pada ditjen perbendaharaan di D.I. Yogyakarta tahun 2018	X1: Difusi inovasi program SAKTI Y: Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen	Proses difusi inovasi SAKTI menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam saluran komunikasi yang digunakan. Setidaknya ada dua lembaga formal yang mengkomunikasikan SAKTI yaitu Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan (Direktorat SITP) dalam hal ini Seksi Publikasi, Komunikasi dan

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
						Sistem Informasi (Seksi PKSI) dan Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta dalam hal ini Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (Bidang SKKI) pada Seksi Supervisi Teknis Aplikasi (Seksi STA).
5.	(Anwar & Hadi, 2022)	Jurnal Informatika	Implementasi Aplikasi Sakti Dan Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	X1: aplikasi sakti X2: aplikasi SPAN X3: Laporan Keuangan	Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Adapun data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder Pengumpulan data primer dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara	Proses penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak baik laporan keuangan sebagai satuan kerja pada sistem aplikasi SAKTI maupun laporan keuangan sebagai kuasa BUN pada sistem aplikasi SPAN sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Proses bisnis GLP SAKTI maupun SPAN yang dijalankan di KPPN Pontianak sudah sesuai dengan prosedur yang diharapkan.
6.	(DJUANDA, 2023)	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi	Penerapan Aplikasi Laporan Keuangan di Kementerian	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi	Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, penelitian deskriptif	Seluruh transaksi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah diselesaikan di

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
			Indonesia: Rekonsiliasi Single Database Sakti		kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Sumber dan data dalam penelitian didapatkan langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer yaitu, data yang didapatkan dari sumbernya dan sumber data sekunder yaitu, data yang didapatkan baik langsung maupun tidak langsung.	AplikasiSAKTI dan telah terbit SHR untuk rekonsiliasi periode September 2022. Sehingga LK Triwulan III Tahun 2022 untuk setiap jenjang Unit Akuntansi & Unit Pelaporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 dengan menggunakan data transaksi terbuku pada Aplikasi SAKTI sampai dengan tanggal 30 September 2022. Penggunaan sistem SAKTI diawali dengan migrasi saldo awal yang berisikan nilai persediaan, aset tetap dan neraca dari aplikasi sebelumnya (E-rekon LK). Kemudian dilanjutkan dengan penginputan transaksi maupun pendetailan pada modul bendahara, Komitmen, Aset, Persediaan dan GLP. Proses validasi dan posting jurnal dilakukan secara otomatis oleh sistem, begitu pula

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
						<p>dengan proses rekonsiliasi dengan sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) hingga penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Data per 30 September 2022 dari seluruh satker yang terdapat di SAKTI, akan dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Tingkat Kementerian.</p> <p>Dalam wawancara dengan beberapa informan yang memiliki tugas terkait, dijelaskan bahwa peran rekonsiliasi sangatlah penting dilakukan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan guna mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspen) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan</p>

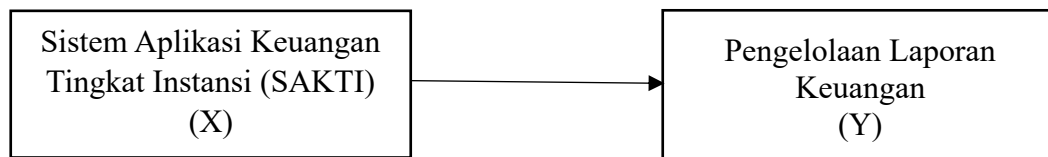
No.	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
7.	(Oktaviyani & Kuntadi, 2022)	<i>Dinasti international journal of economic, finance and accounting</i>	<i>Factors Influencing the Acceptance of Sakti</i> Application: <i>Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Perceived Risk on State Financial Planning and Budgeting</i>	<i>X1: Factors Influencing the Acceptance of Sakti</i> <i>Application X2 : Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Perceived Risk on State Financial Planning and Budgeting</i>	<i>The methods of writing this scientific article are qualitative research and library research. Examine theories and relationships between variables from books and journals, both offline in the library and online sourced from Mendeley, Scholar Google, and other online media. In qualitative research, a literature review must be used consistently with methodological assumptions. This</i>	<i>The success of technology can be seen from the perspective of its users. This means that no matter how great the technology is created, it will be useless if no one wants to use it. Therefore, the aspect of technology acceptance among users is important to note. This research seeks to explain some of the factors that influence the acceptance of SAKTI. Based on theory, relevant articles, and discussion, hypotheses can be formulated for further empirical research, namely:</i> <i>1. Perceived usefulness affects the acceptance of SAKTI.</i> <i>2. Perceived ease of use affects the acceptance of SAKTI.</i> <i>3. Perceived risk affects the acceptance of SAKTI.</i>
8.	(At-tamimi & Siregar, 2021)	<i>Budapest International Research</i>	<i>Measurement of Successful Implementation</i>	<i>X1: Implementation of Institution</i>	<i>The object studied in this study was the SAKTI web</i>	<i>Based on the results of analysis and testing, it is</i>

No.	Nama Penulis	Nama Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
		<i>and Critic Institute Journal</i>	<i>of Institution Level Financial Application System (SAKTI) Web Full Module with DeLone and McLean Information System Success Model Approach</i>	<i>Level Financial Application System (SAKTI) X2: DeLone and McLean Information System Success Model Approach</i>	<i>application on Satker in the Ministry of State Secretariat which carried out the piloting of Sakti web full module phase II. The sample in this study is SAKTI users who have the level of operational authority of modules, namely operators, validators and approvers of 98 people. The sample selection method used is non-probability method using purposive sampling technique. The data collection method in this study used a self-administrative survey method 10100 H1(Wu and Wang, (2006), (Chiu et al, 2007), (Wahyuni, 2011), (Efendy, 2013), (Pambudi, 2018), (Amriani, Iskandar</i>	<i>concluded that the implementation of the SAKTI web application within the Ministry of State Secretariat has empirically proven not to be successful and succeed based on all indicators or the Delone and McLean model approach. Of the four hypotheses proposed, not all of them are proven and can be accepted. Of the four hypotheses in this study, three hypotheses can be accepted while one hypothesis is rejected in this study. System quality, information quality has a significant positive effect on user satisfaction. This indicates that the higher the quality of the system, the information quality of SAKTI web, the higher the user satisfaction.</i>

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan gambaran umum penelitian dan merupakan unsur mendasar dalam proses berpikir.

Kerangka konseptual adalah alat yang digunakan peneliti untuk memandu penelitian mereka. Alat ini adalah sekumpulan ide untuk menyusun penelitian, semacam peta yang mencakup pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, metode, dan analisis data. Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan gambaran logis dan pola kerangka penelitian, sehingga penelitian ini dapat lebih fokus pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, memberikan logika penelitian dalam menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Dari penjelasan tersebut peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:93) dalam (Lutfi & Sunardi, 2019) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori-teori relevan, belum didasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Adapaun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berpengaruh positif dan signifikan dalam pengelolaan laporan keuangan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.